

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM LARASITA
DI KABUPATEN KARAWANG**

**INFLUENCE OF POLICY IMPLEMENTATION
ON THE EFFECTIVENESS OF THE LARASITA PROGRAM
IN KARAWANG DISTRICT**

Tati Sarihati

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana
sarihati.tati@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah program Larasita belum efektif di Karawang. Berdasarkan fenomena ini, peneliti menduga bahwa masalah tersebut dipengaruhi oleh variabel implementasi kebijakan. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah: "Seberapa besar pengaruh efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam program Larasita Kabupaten Karawang".

Untuk menganalisis masalah penelitian ini digunakan pendekatan teoritis implementasi kebijakan Edward III dalam Winarno, (2008: 208), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun efektivitas variabel program pendekatan yang digunakan adalah teori Siagian (1997: 153) dimensi ukuran waktu, ukuran harga, ukuran nilai sosial dan budaya dan akurasi pengukuran.

Berdasarkan pendekatan teori pada teori, hipotesisnya adalah: "Besarnya pengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan dalam program Larasita Kabupaten Karawang ditentukan oleh dimensi implementasi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei eksplanatori (*explanatory survey method*) sedangkan sumber pengumpulan data menggunakan studi literatur dan studi lapangan yang meliputi: inkuiri, observasi, dan wawancara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel acak sederhana (Simple Random Sampling). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan menunjukkan penelitian yang menunjukkan pengaruh korelasi positif dan signifikan antara efektivitas implementasi kebijakan program Larasita di Karawang. Kondisi ini memperjelas bahwa besarnya pengaruh pada efektivitas implementasi kebijakan dalam program Larasita Kabupaten Karawang ditentukan oleh dimensi implementasi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Ditemukan pula pengaruh variabel lain yang mempengaruhi efektivitas program Larasita di Karawang.

Kata kunci : Implementasi, Larasita, Kebijakan

ABSTRACT

The background of the problem in this study is not yet effective Larasita program in Karawang. Based on this phenomenon, researchers suspect that the problem is influenced by

the variable policy implementation. Based on these problems, researchers formulate the problem: "How much influence on the effectiveness of policy implementation in the Karawang regency Larasita program".

To analyze the problem of this study used theoretical approach of implementation of the policy of Edward III in Winarno, (2008: 208), namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. As for the effectiveness of the program variable used approach is the theory of Siagian (1997: 153) the size dimension of time, the size of the price, the size of the social and cultural values and measurement accuracy.

Based on the theoretical approach to the theory, the hypothesis is: "The amount of influence on the effectiveness of policy implementation in the Karawang regency Larasita program is determined by the dimensions of the implementation of the communication, resources, disposition and bureaucratic structure".

The method used in this research is an explanatory survey method (explanatory survey method) while the source of data collection using literature study and field study that includes: inquiry, observation, and interviews. The sampling technique used was simple random sample (Simple Random Sampling). The data analysis technique used is the path analysis.

Based on the results of data processing is done shows research that shows the influence of positive and significant correlation between the effectiveness of policy implementation Larasita program in Karawang. This condition makes clear that the magnitude of the effect on the effectiveness of policy implementation in the Karawang regency Larasita program is determined by the dimensions of the implementation of the communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Also found the influence of other variables that influence the effectiveness of programs Larasita in Karawang.

Keywords: *Implementation, Larasita, Policy*

1. PENDAHULUAN

Peningkatan pembangunan di segala bidang dan tuntutan akan adanya mutu kehidupan yang lebih baik merupakan dampak positif dari keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Semua ini memerlukan tanah sebagai sarana dasarnya, sehingga tanah perlu dikelola dan diatur secara nasional dalam rangka mewujudkan tanah untuk "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Aktifitas kegiatan di perkotaan seperti perdagangan, pemerintahan, dan permukiman terus membutuhkan lahan yang semakin luas. Pertambahan penduduk di pusat kota dan tuntutan kehidupan baik aspek sosial, politik, budaya pada akhirnya akan membutuhkan fasilitas dan utilitas seperti permukiman, pendidikan, kesehatan keberlanjutan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan. Selain dari pada itu

dan sarana umum lainnya membutuhkan lahan untuk keberlangsungannya.

Pensertipikatan tanah merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) ayat 1 menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah diselenggarakan hendaknya memperhatikan prinsip bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, menjamin

pendaftaran tanah juga merupakan pelaksanaan dari 11 Agenda BPN-RI, khususnya untuk meningkatkan pelayanan

pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah.

Pelaksanaan kewenangan tersebut di atas diserahkan sepenuhnya kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional) yang ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, antara lain melanjutkan penyelenggaraan pendaftaran tanah sesuai dengan amanat Pasal 19.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dilaksanakan selama ini melalui 2 (dua) cara, yaitu :

1. Pendaftaran tanah secara sistematis melalui program pemerintah yang dibiayai dari APBN, APBD, Bank Dunia dalam bentuk proyek, seperti : Prona, adjudikasi dan LMPDP.
2. Pendaftaran tanah secara sporadis yang dilakukan atas dasar permintaan dari pemilik tanah yang bersangkutan/berkepentingan, baik secara individual maupun massal.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Badan Pertanahan Nasional telah mengimplementasikan kebijakandalam Program LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA BPN RI. Program Larasita merupakan Kantor Pertanahan Bergerak (*Mobile Land Office*), Program LARASITA ini dilakukan secara serentak dilaksanakan diseluruh Indonesia mulai tahun 2008 termasuk di Kabupaten Karawang. Program LARASITA dilakukan dengan cara memberikan pelayanan pertanahan secara jemput bola dengan mendatangi masyarakat, sehingga

Belum efektifnyaprogram LARASITA tersebut, penulis duga disebabkan salah satunya oleh implementasi kebijakan Program LARASITA yang belum berjalan

diharapkan dapat memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan layanan pertanahan, yang memiliki prinsip “Mudah, Murah, Cepat dan Akurat”, selain itu pun dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam proses pembuatan sertifikat, dan dapat menghapuskan percaloan dalam pembuatan sertipikat tanah.

Berdasarkan hasil peninjauan awal ditemukan indikasi indikasi yang menunjukkan belum efektifnyaprogram pelayan pembuatan sertipikat tanah melalui program LARASITA di Kabupaten Karawang yaitu :

1. Waktu penyelesaian pekerjaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, contoh : proses pembuatan sertipikat yang seharusnya selesai selama 98 (sembilan puluh delapan) hari atau ± 3 s/d 4 bulanberdasarkan SPOPP, sering melebihi batas waktu yang telah ditetapkan,
2. Penyelesaian pembuatan Peta Bidang dan Surat Ukur (SU) yang seharusnya selesai dalam waktu 14 hari kerja yang terjadi melewati batas waktu yang telah ditentukan sehingga terdapat tunggakan pekerjaan pembuatan Peta Bidang dan Surat Ukur (SU).
3. Transparansi harga/ biaya pelayanan dalam pembuatan sertipikat tanah melalui Program LARASITA, contoh : masih adanya ketidaksesuaian harga/ biaya antara yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada BPN RI, hal ini dikarenakan adanya biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi yang dibebankan pada pemohon.

optimal. Hal ini tercermin dari indikasi sebagai berikut :

1. Fasilitas penunjang yang tersedia masih kurang memadai, contoh: terlihat dari sarana Modem GPRS masih belum

terkoneksi (belum *on-line*) antara server dengan Mobil dikarenakan koneksi dari Modem GPRS sering mengalami gangguan (putus-putus) dengan aplikasi LARASITA yang ada di server KKP, sehingga terdapat kendala dari jaringan Telkom, sehingga masih dilakukannya secara *manual* yang menyebabkan kurang telitinya laporan yang disampaikan pegawai pada Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan.

2. Kurangnya kerjasama/ koordinasi antar unit kerja, contoh : terlambatnya penyelesaian pembuatan Peta Bidang dan Surat Ukur (SU) oleh Seksi Pengukuran dan Pemetaan (SPP) yang seharusnya selesai dalam waktu 14 hari kerja yang terjadi melewati batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SPOPP).

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka *problem statment* (pernyataan masalah) yang dapat penulis kemukakan adalah program LARASITA di Kabupaten Karawang belum efektif, hal tersebut diduga disebabkan oleh implementasi kebijakan belum dilaksanakan dengan optimal.

Dari pernyataan masalah tersebut diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut: "Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas program LARASITAdi Kabupaten Karawang".

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis besarnya pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas program LARASITAdi Kabupaten Karawang.

secara simultan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau menghambat implementasi kebijakan pemerintah.

Penjelasan lebih lanjut tentang faktor-faktor dalam implementasi kebijakan

2. Mengembangkan konsep tentang implementasi kebijakan dan efektivitas program LARASITAdi Kabupaten Karawang.
3. Menerapkan secara teoritis konsep implementasi kebijakan dan efektivitas program LARASITAdi Kabupaten Karawang.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bagi kajian ilmu pemerintahan, khususnya menyangkut implementasi kebijakan dan efektivitas program pemerintah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Edwards III (1980:1) mengemukakan bahwa : "*Policy implementastion,... is the stage of policy-making between the establishment of a policy... and the consequencies of the policy for the people whom it effects*". Rumusan tersebut mengandung arti bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari suatu program yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan.

Terkait dengan konsep di atas, Edwards III (1980:10-11) menyebutkan bahwa "*Four critical factors or variables in implementing public policy: Communication; resources, dispotions or attitude and bureaucratic structure*" yang

menurut Edwards III dalam Agustino (2006:157) adalah sebagai berikut:

1. *Communication* (Komunikasi).

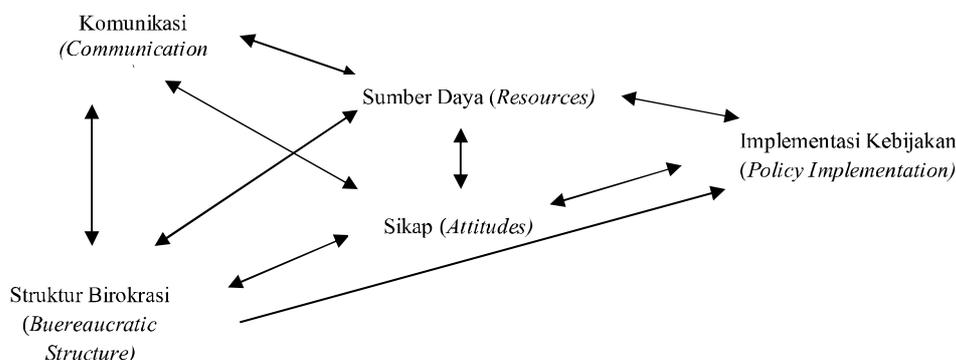
Komunikasi memegang peranan penting dalam Implementasi

- kebijakan publik, bahwa implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat keputusan (*decision-makers*) sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan baru dapat berjalan manakala komunikasi berlangsung dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Ada tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan faktor komunikasi tersebut, yakni :
- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
 - b. Kejelasan (*clarity*), komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/ mendua).
 - c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dikerjakan).
2. *Resources* (sumber daya)
- Sumberdaya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan rapi dan baik, yaitu:
- a. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf/pegawai atau lebih tepatnya *street-level-bureaucrats*. Kegagalan dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/ pegawai yang dengan cara melakukan koordinasi dengan baik. Dua Karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi Oleh karena itu diperl/ organisasi ke arah yang lebih baik adalah melakukan :
- tidak mencukupi atau memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
 - c. Wewenang, yakni otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.
 - d. Fasilitas, yakni sarana dan prasarana pendukung implementasi kebijakan.
3. *Dispositions or Attitudes* (Disposisi atau sikap)
- Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan. Manakala implementasi kebijakan ingin berjalan dengan efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal penting yang harus diperhatikan dalam faktor disposisi antara lain:
- a. Pengangkatan birokrat, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah berdasarkan kompetensi dan dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
 - b. Insentif, yakni menambah keuntungan atau penghasilan bagi para pelaksana kebijakan.
4. *Buereaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)
- Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik
- a. Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*), adalah kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/ administrator/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya

detiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- b. Fragmentasi (*fragmentation*), upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja.

Keempat faktor-faktor dalam implementasi kebijakan tersebut dalam penerapannya sangat simultan, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dan selanjutnya oleh peneliti dijadikan alat ukur untuk variabel bebas. Secara visual dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Model Implementasi Edwards III
Sumber : Winarno, 2002

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Edwards III dan teori pendekatan tujuan yang membahas masalah efektivitas pelaksanaan program kerja. Pengertian efektivitas menurut Siagian (1997:151), menegaskan bahwa :“Efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditentukan sebelumnya, artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung bilamana tugas tersebut diselesaikan dan tidak, terutama cara melaksanakannya dan berapa biaya yang diselesaikan”.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa pengertian efektivitas adalah apakah pelaksanaan sesuai tugas dinilai baik/ tidak sangat tergantung bilamana tugas itu diselesaikan, dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Dengan kata lain, efektivitas adalah suatu hasil kerja yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya/ kemampuan

berhasilnya suatu sesuai dengan yang diharapkan.

Selanjutnya Siagian (1997:153) mengemukakan beberapa ukuran dari efektivitas yaitu:

1. Ukuran waktu, yaitu berapa lama seseorang membutuhkan jasa tertentu untuk memperolehnya.
2. Ukuran harga, dalam arti berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh jasa yang dibutuhkan
3. Ukuran nilai-nilai social budaya dalam arti cara penghasil jasa menyampaikan produknya kepada kliennya.
4. Ukuran ketelitian yang menunjukkan apakah jasa yang diberikan akurat atau tidak.

Implementasi kebijakan dengan efektivitas pada hakekatnya memiliki orientasi yang sama, yaitu tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana dikemukakan oleh Suryaningrat (1991:13) bahwa

:"Pelaksanaan kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan mempergunakan sarana dan urutan waktu tertentu". Pelaksanaan kebijakan dapat pula dirumuskan sebagai penggunaan yang terpilih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berkaitan dengan pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa implementasi kebijakan diindikasikan memiliki pengaruh serta memiliki korelasi dengan efektivitas pelaksanaan program kerja. Oleh karena itu, efektivitas program dapat ditingkatkan melalui optimalisasi implementasi kebijakan melalui komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang dapat membentuk kinerja (*performance*) aparatus yang pada akhirnya dapat menunjukkan efektivitas program yang telah ditentukan .

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini survei *eksplanatori* merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan/pengaruh antar variabel yang diteliti berdasarkan suatu data yang diamati, sehingga dapat menjelaskan dan menguraikan secara sistematis fenomena-fenomena atau kenyataan empiris yang diteliti untuk kemudian dianalisis agar diperoleh solusi terbaik.

Desain penelitian menggambarkan hubungan struktur variabel-variabel secara komprehensif, yaitu hubungan sebab akibat, dalam hal ini implementasi kebijakan sebagai variabel (X) berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai sebagai variabel (Y).

3.2. Unit Analisis, Populasi, dan Sampel Penelitian

Unit analisis merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian dimana objek penelitian melekat dan kesimpulan penelitian digeneralisasikan. Beberapa referensi menyebutkan unit analisis sama dengan subjek penelitian. terkait dengan

penelitian yang akan dilakukan, maka unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yang melaksanakan secara langsung program LARASITA.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yang melaksanakan secara langsung Program LARASITA yang berjumlah sebanyak 147 orang dengan distribusi menurut unit kerja dan golongan.

Penentuan ukuran sampel minimum untuk teknik analisis jalur (*path analysis*) dilakukan dengan prosedur iteratif (dalam Harun Al Rasyid, 1994 : 157), yaitu dengan formulasi :

$$\mu_{\rho} = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+\rho}{1-\rho} \right)$$

$$n_i = \frac{(Z_{1-\alpha} + Z_{1-\beta})^2}{(\mu_{\rho})^2} + 3$$

$$\mu'_{\rho} = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+\rho}{1-\rho} \right) + \frac{\rho}{2(n_i - 1)}$$

Keterangan:

- μ_{ρ} : Simbol *miu* untuk rata-rata parameter korelasi
- μ'_{ρ} : Simbol *miu* untuk rata-rata parameter korelasi yang disesuaikan
- \ln : Log-e (*natural logarithm*)
- n_i : Ukuran sampel iterasi ke-*i*
- ρ : perkiraan parameter korelasi minimum antara variabel penelitian
- $Z_{1-\alpha}$: Nilai yang diperoleh dari Tabel Distribusi Normal Baku dengan α yang ditentukan
- $Z_{1-\beta}$: Nilai yang diperoleh dari Tabel Distribusi Normal Baku dengan β yang ditentukan

Tahap penentuan ukuran sampel minimum menggunakan metode di atas adalah :

Pertama, menentukan besaran nilai *alpha*(α), *beta*(β) dan *rho* (ρ) sesuai dengan kebutuhan perhitungan sampel dari kerangka pemikiran yang dibangun dalam penelitian. Nilai *alpha* menunjukkan peluang kekeliruan tipe I yaitu peluang menerima hipotesis penelitian sedangkan hipotesis penelitian salah, kemudian *beta*

adalah peluang kekeliruan tipe II yaitu peluang menolak hipotesis penelitian sedangkan hipotesis penelitian adalah benar. Sedangkan ρ mengacu pada formula sampel diatas, serta penentuan $\alpha=0.05$, $\beta = 0.1$ dan nilai korelasi

minimum yang ditetapkan (ρ) = 0.30. Nilai Dari dari tabel distribusi normal diperoleh $Z_{1-\alpha} = 1.645$ dan $Z_{1-\beta} = 1.281$.

Kedua, melakukan proses iterasi sebagai berikut :

Iterasi Tahap Pertama :

Hitung Nilai μ_ρ

$$\mu_\rho = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+\rho}{1-\rho} \right)$$

$$\mu_\rho = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+0.30}{1-0.30} \right) = 0.30952$$

Hitung nilai n_1

$$n_1 = \frac{(Z_{1-\alpha} + Z_{1-\beta})^2}{(\mu_\rho)^2} + 3$$

$$n_1 = \left\{ \frac{(1.645 + 1.281)^2}{0.30952^2} \right\} + 3 = 92.39075$$

Iterasi Tahap Kedua :

Hitung Nilai μ'_ρ

$$\mu'_\rho = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+\rho}{1-\rho} \right) + \frac{\rho}{2(n_1-1)}$$

$$\mu'_\rho = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+0.30}{1-0.30} \right) + \frac{0.30}{2(92.39075-1)} = 0.311161$$

$$n_2 = \frac{(Z_{1-\alpha} + Z_{1-\beta})^2}{(\mu'_\rho)^2} + 3$$

$$n_2 = \left\{ \frac{(1.645 + 1.281)^2}{(0.311161)^2} \right\} + 3 = 91.45021$$

Iterasi Tahap Ketiga :

Hitung Nilai μ''_ρ

$$\mu''_\rho = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+\rho}{1-\rho} \right) + \frac{\rho}{2(n_2-1)}$$

$$\mu''_\rho = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+0.30}{1-0.30} \right) + \frac{0.30}{2(91.45021-1)} = 0.311178$$

$$n_3 = \left\{ \frac{(1.645 + 1.281)^2}{(0.311178)^2} \right\} + 3 = 91.44051 \approx 92$$

Terlihat dari perhitungan diatas nilai n_2 dengan n_3 relatif sama sehingga dapat dikatakan proses iterasi sudah selesai.

Dengan demikian maka sampel minimum dalam penelitian ini adalah sebesar 92 orang responden.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *stratified random sampling* dengan pemikiran bahwa efektivitas kerja pegawai berbeda untuk setiap golongan dan unit kerja. Ukuran sampel tersebut didistribusikan secara *proporsional* ke setiap unit kerja dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Nazir (1988:365) sebagai berikut:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Tabel 1

Distribusi Sampel Menurut Unit Kerja dan Golongan

No	Unit	Jumlah Pegawai				Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1	Subbagian Tata Usaha	3	1	8	1	13
2	Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan	0	5	18	1	24
3	Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	0	1	4	1	6
4	Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan	0	1	3	1	5
5	Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan	0	1	3	-	4
6	Seksi Sengketa Konflik dan Perkara	0	1	2	-	3
7	PTT	-	-	-	-	38
JUMLAH		4	4	38	4	92

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari buku-buku teks, jurnal, dokumen-dokumen, karya tulis, dan hasil penelitian lainnya yang relevan dengan topik penelitian sebagai landasan teoritis.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan bertujuan untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Observasi, yaitu kegiatan pengamatan dari dekat dan pencatatan objek penelitian tanpa melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan Program LARASITA secara non partisipan.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.
- c. Angket yaitu dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden yang bersifat tertutup, dimana setiap

Keterangan:

n_i = Ukuran Sampel dari pegawai i

n = Ukuran Sampel pegawai

N_i = Jumlah populasi pada pegawai i

N = Jumlah populasi

Distribusi sampel penelitian disajikan

dalam tabel di bawah ini :

pertanyaan sudah disediakan alternatif jawabannya. Responden tinggal memilih salah satu alternatif jawaban yang dianggap sesuai dengan kenyataan empirik, penjarangan jawaban responden digunakan kuesioner teknik *rating scale*, yaitu skala pengukurannya pada tingkat skala ordinal dengan kategori sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

3.4 Uji Kuesioner Penelitian

3.4.1 Uji Validitas

Uji validitas ditentukan oleh tingkat hubungan atau tingkat keeratan (korelasi) antara item-item yang ada dengan jumlah skornya dengan menggunakan rumus *Product Moment* (Arikunto, 1992:19) sebagai berikut :

$$r = \frac{\sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{n}}{\sqrt{\left[X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n} \right] \left[\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n} \right]}}$$

Dimana :

- r = koefisien korelasi Pearson antara item dengan variabel yang bersangkutan
- X = Skor item dalam variabel
- Y = Skor semua item dalam variabel tersebut
- n = Jumlah responden

3.4.2 Uji Reliabilitas

Metoda yang digunakan untuk menguji reliabilitas (keandalan) alat ukur pada penelitian ini digunakan interval consistency dengan teknik alpha cronbach's (Sugiyono, 2001:109) formulasi sebagai berikut :

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum s_i^2}{s_T^2} \right]$$

Dimana :

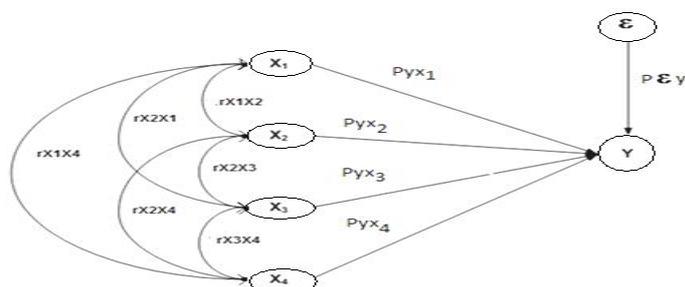
- α = Realiabilitass_i² = varians item ke-i
- s_T² = varians skor total

Kuesioner dinyatakan reliabel jika memiliki koefisien alpha cronbach's lebih besar dari 0.700.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis jalur (*Path Analysis*).

Variabel-variabel yang digambarkan dalam penelitian ini adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi sebagai variabel bebas (X) serta hubungannya terhadap efektivitas kerja pegawai melalui melalui ukuran waktu, ukuran harga, ukuran nilai-nilai sosial budaya dan ukuran ketelitian sebagai variabel terikat (Y). Selain itu terdapat hubungan variabel lain yang tidak diteliti (ϵ) epsilon yang berpengaruh terhadap variabel Y.



Gambar 3
Jalur Variabel X₁, X₂, X₃, X₄ dan Y serta Variabel Residu (Secara Parsial)

Keterangan:

X ₁	=	Komunikasi	X ₄	=	Struktur Birokrasi
X ₂	=	Sumberdaya	P _{yx1... Pyx4}	=	Koefisien jalur dari X ₁ X ₄ ke Y
X ₃	=	Disposisi/ Sikap	P _{yε}	=	Koefisien variabel residu/ epsilon

4.

HASIL PENELITIAN

a. Pengaruh Simultan

Besar pengaruh simultan dari variabel implementasi kebijakan terhadap efektivitas program LARASITA di Kabupaten Karawang adalah sebesar koefisien determinasi multiple yaitu $R^2 = 0.856$ atau 85.6%. Ini artinya bahwa

secara simultan sebesar 85.6% perubahan-perubahan dalam efektivitas program LARASITA dipengaruhi oleh variabel implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan aspek struktur birokrasi. Sedangkan sisanya sebesar 14.4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Pengaruh Parsial

Pengaruh parsial adalah pengaruh dari variabel eksogen secara individu terhadap variabel endogen melalui variabel eksogen lainnya. Dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh dari variabel komunikasi terhadap efektivitas program LARASITA baik secara langsung dan tidak langsung melalui variabel sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

$$\begin{aligned}
 \text{Pengaruh Langsung} &= P^2_{YX_1} \\
 &= 0.160^2 \\
 &= 0.025 \text{ atau } 2.5\% \\
 \text{Pengaruh Tidak Langsung} &: \\
 \text{Melalui faktor sumber daya} &= (P_{YX_1})(r_{X_2X_1})(P_{YX_2}) \\
 &= (0.160)(0.601)(0.308) \\
 &= 0.030 \text{ atau } 3\% \\
 \text{Melalui faktor Disposisi} &= (P_{YX_1})(r_{X_3X_1})(P_{YX_3}) \\
 &= (0.160)(0.534)(0.241) \\
 &= 0.020 \text{ atau } 2\% \\
 \text{Melalui faktor Struktur} &= (P_{YX_1})(r_{X_4X_1})(P_{YX_4}) \\
 \text{Birokrasi} &= (0.160)(0.624)(0.368) \\
 &= 0.037 \text{ atau } 3.7\% \\
 \text{Pengaruh Total} &= 0.11 \text{ atau } 11\%
 \end{aligned}$$

2. Pengaruh dari Sumber Daya terhadap efektivitas program LARASITA baik secara langsung dan tidak langsung melalui variabel komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi.

$$\begin{aligned}
 \text{Pengaruh Langsung} &= P^2_{YX_2} \\
 &= 0.308^2 \\
 &= 0.095 \text{ atau } 9.5\% \\
 \text{Pengaruh Tidak Langsung} &: \\
 \text{Melalui faktor Komunikasi} &= (P_{YX_2})(r_{X_2X_1})(P_{YX_1}) \\
 &= (0.308)(0.601)(0.160) \\
 &= 0.030 \text{ atau } 3\%
 \end{aligned}$$

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| Melalui faktor Disposisi | = | $(P_{YX2})(r_{X3X2})(P_{YX3})$ |
| | = | $(0.308)(0.530)(0.241)$ |
| | = | 0.039 atau 3.9% |
| Melalui faktor Struktur Birokrasi | = | $(P_{YX2})(r_{X4X2})(P_{YX4})$ |
| | = | $(0.308)(0.793)(0.368)$ |
| | = | 0.090 atau 9% |
| Pengaruh Total | = | 0.25 atau 25% |
3. Pengaruh dari Disposisi terhadap efektivitas program LARASITA baik secara langsung dan tidak langsung melalui variabel komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi.
- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| Pengaruh Langsung | = | P_{YX3}^2 |
| | = | 0.241^2 |
| | = | 0.058 atau 5.8% |
| Pengaruh Tidak Langsung Melalui faktor Komunikasi | : | $(P_{YX3})(r_{X3X1})(P_{YX1})$ |
| | = | $(0.241)(0.534)(0.160)$ |
| | = | 0.02 atau 2% |
| Melalui faktor Sumber Daya | = | $(P_{YX3})(r_{X3X2})(P_{YX2})$ |
| | = | $(0.241)(0.530)(0.308)$ |
| | = | 0.039 atau 3.9% |
| Melalui faktor Struktur Birokrasi | = | $(P_{YX3})(r_{X4X3})(P_{YX4})$ |
| | = | $(0.241)(0.620)(0.368)$ |
| | = | 0.055 atau 5.5% |
| Pengaruh Total | = | 0.17 atau 17% |
4. Pengaruh dari Struktur Birokrasi terhadap efektivitas program LARASITA baik secara langsung dan tidak langsung melalui komunikasi, sumber daya dan Disposisi.
- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| Pengaruh Langsung | = | P_{YX4}^2 |
| | = | 0.368^2 |
| | = | 0.136 atau 13.6% |
| Pengaruh Tidak Langsung Melalui faktor Komunikasi | : | $(P_{YX4})(r_{X4X1})(P_{YX1})$ |
| | = | $(0.368)(0.624)(0.160)$ |
| | = | 0.037 atau 3.7% |
| Melalui faktor Sumber Daya | = | $(P_{YX4})(r_{X4X2})(P_{YX2})$ |
| | = | $(0.368)(0.793)(0.308)$ |
| | = | 0.09 atau 9% |
| Melalui faktor Struktur Birokrasi | = | $(P_{YX4})(r_{X4X3})(P_{YX3})$ |
| | = | $(0.368)(0.620)(0.241)$ |
| | = | 0.055 atau 5.5% |
| Pengaruh Total | = | 0.32 atau 32% |

Setelah dilakukan perhitungan besar pengaruh diperoleh besar pengaruh secara simultan dari variabel implementasi kebijakan terhadap efektivitas program LARASITA adalah sebesar koefisien determinasi multiple yaitu $R^2 = 0.856$ atau 85.6%. Selanjutnya besar pengaruh dari komunikasi terhadap efektivitas program LARASITA adalah 11.2%, pengaruh dari

sumber daya adalah sebesar 25.4%, besar pengaruh dari disposisi sebesar 17.3% dan besar pengaruh dari struktur birokrasi adalah sebesar 31.7%. Dari hasil ini diketahui bahwa pengaruh terbesar dari implementasi kebijakan terhadap efektivitas program LARASITA diberikan oleh struktur birokrasi. Ini artinya faktor yang paling dominan dalam meningkatkan

efektivitas program LARASITA adalah faktor struktur birokrasi.

4.1 Analisis Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Pengaruh Simultan dari Variabel Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Program LARASITA

Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa terapat pengaruh signifikan dari implementasi kebijakan terhadap efektivitas program LARASITA di Kabupaten Karawang. Perhitungan menggunakan analisis jalur diperoleh besar pengaruh dari implementasi kebijakan terhadap efektivitas program LARASITA memberikan hasil yang sangat besar yaitu mencapai 0.856 atau sebesar 85.6%. hanya sebesar 14.4% pengaruh dari faktor lain. Hasil ini menunjukkan bahwa salah satu faktor dari sekian banyak faktor yang mungkin berpengaruh terhadap efektivitas program LARASITA adalah implementasi kebijakan. Sehingga perbaikan pada implementasi kebijakan tentunya akan memberikan dampak besar terhadap perubahan efektivitas program LARASITA ke arah yang lebih baik.

Tingginya pengaruh dari implementasi kebijakan terhadap efektivitas program LARASITA diharapkan memberikan dampak positif pada masyarakat yang dilayani sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan layanan pertanahan sehingga tujuan akhir dari implementasi kebijakan dapat tercapai. Hasil ini didukung oleh pendapat Nugroho (2008:432) yang berpendapat bahwa "Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya", dalam hal ini melalui peningkatan efektivitas kerja pegawai,

dapat memberikan kemudahan dan percepatan bagi masyarakat dalam urusan pertanahan.

Hasil analisis deskriptif dan wawancara dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan LARASITA, diperoleh gambaran umum bahwa implementasikan kebijakandalam Program LARASITA (Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA BPN RI sebagai salah satu faktor yang memang diharapkan mampu memberikan perbaikan terhadap efektivitas kerja pegawai dalam melayani masyarakat. Indikasi perbaikan ditunjukkan dari faktor-faktor yang berperan dalam implentasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan faktor struktur birokrasi.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan skor total dari faktor komunikasi sebesar 73.4%, sumber daya sebesar 69.0%, disposisi sebesar 75.9% dan faktor struktur birokrasi sebesar 66.2%. Dari hasil analisis deksiptif ini dapat dianalisis bahwa secara umum implementasi kebijakan program LARASITA sudah berjalan dengan baik namun demikian khusus untuk faktor struktur birokrasi masih dipersepsikan kurang baik oleh sebagian responden. Sehingga dalam upaya peningkatan efektivitas program LARASITA, perlu dilakukan perbaikan pada struktur birokrasi yang meliputi aspek kejelasan deskripsi pekerjaan dan pembagian kerja, kejelasan *standar operating procedure* serta adanya kerjasama/koordinasi yang antara unit kerja.

Terkait dengan efektivitas program LARASITA, upaya perbaikan pada

implementasi kebijakan program LARASITA akan tercermin dari adanya perbaikan pada aspek waktu, harga, nilai sosial budaya dan ketelitian. Hasil analisis deskriptif menunjukkan skor total untuk faktor waktu mencapai 71.4%, faktor harga sebesar 66.7%, faktor nilai sosial budaya sebesar 74.1% dan faktor ketelitian sebesar 72.3% dengan skor total untuk variabel efektivitas program LARASITA sebesar 71.1%. Secara umum efektivitas program LARASITA dapat dikatakan sudah baik namun khusus terkait dengan masalah ukuran harga masih dipersepsikan kurang baik oleh responden sehingga perlu dilakukan perbaikan yang menyangkut masalah transparansi harga pengurusan pembuatan sertipikat tanah.

2. Analisis Pengaruh Parsial dari Variabel Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Program LARASITA

a. Pengaruh Faktor Komunikasi (X_1)

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Faktor komunikasi berpengaruh terhadap efektivitas program LARASITA dengan besar pengaruh sebesar 0.112 atau 11.2%. Faktor komunikasi ini terdiri dari Penyampaian informasi kebijakan dengan baik (*Transmisi*), Penyampaian informasi kebijakan secara jelas / tidak membingungkan (*Clarity*) dan Penyampaian informasi kebijakan secara konsisten (*Konsistensi*).

Faktor komunikasi merupakan bagian dari informasi kebijakan publik yang perlu disampaikan kepada pelaksana kebijakan. Edwards III dalam Widodo (2010:97) menyatakan bahwa hal ini bertujuan agar “para pelaksana dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah dan kelompok sasaran

(*target group*) kebijakan sehingga para pelaksana dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan dalam melaksanakan kebijakan publik sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai dengan yang diharapkan”. Dengan demikian peneliti merasa bahwa komunikasi merupakan faktor penting dalam memahami sesuatu dalam implementasi kebijakan. Melalui komunikasi pencapaian tujuan akan lebih mudah tercapai, komunikasi juga dapat memudahkan anggota organisasi dalam melakukan kerjasama serta menyamakan persepsi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa menunjukkan secara umum komunikasi yang dilakukan dalam kerangka implementasi kebijakan program LARASITA di Kabupaten Karawang sudah dilakukan dengan baik dimana terlihat diperoleh skor total untuk faktor komunikasi sebesar 73.4% masuk dalam kategori baik. Ini mencerminkan bahwa penyampaian informasi oleh atasan mengenai tujuan kebijakan Program LARASITA dinyatakan dengan baik dan jelas, dinyatakan secara rinci dan secara konsisten sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan.

b. Pengaruh Faktor Sumber Daya (X_2)

Hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor sumber daya berpengaruh terhadap efektivitas program LARASITA adalah sebesar 0.254 atau 25.4%. Faktor sumber daya terdiri dari indikator jumlah aparat pelaksana, wewenang aparat pelaksana, dan fasilitas penunjang yang tersedia.

Faktor sumber daya tidak hanya mencakup sumber daya manusia/aparat semata melainkan juga

mencangkup wewenang aparat pelaksana dan juga fasilitas pendukung implementasi kebijakan. Peneliti mencermati bahwa sumber daya merupakan sarana yang penting untuk digunakan dalam mengoperasionalkan suatu kebijakan. Edwards III (1980:52) menyatakan “kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan atau aturan-aturan (*laws*) tidak akan menjadi kuat, kinerja tidak akan diberikan dan pengaturan (*regulations*) yang beralasan tidak akan dikembangkan”.

Melaksanakan kebijakan perlu didukung oleh peralatan yang memadai. Widodo (2010:93) menyatakan bahwa “tanpa peralatan yang cukup dan memadai akan dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kebijakan”. menurut Agustino (2006:158) sumberdaya ini dapat meliputi : staf/pegawai atau lebih tepatnya *street-level-bureaucracy*, informasi (cara melaksanakan kebijakan dan kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan), wewenang dan fasilitas yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Sehingga terlihat bahwa variabel sumber daya mempunyai peranan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan.

Hasil survey menunjukkan faktor sumber daya secara umum masih dinilai kurang baik walaupun diperoleh skor total sebesar 69% masuk dalam kategori baik. Hal ini terlihat dari jumlah aparat pelaksana yang dinilai masih kurang memadai dilihat secara kuantitas. Hasil penelitian pembagian jumlah pegawai antar seksi jumlahnya sangat bervariasi, jika melihat beban kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing seksi relative hampir sama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembagian jumlah pegawai semestinya mempertimbangkan analisis beban kerja yang ada pada

masing-masing seksi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa *leading sector* program LARASITA berada di Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, dengan jumlah pegawai sebanyak 9 orang. Untuk mencapai target dan tujuan dari program LARASITA tersebut maka seksi ini diperbantukan oleh tenaga honorer sebanyak 16 orang.

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa dari sisi fasilitas yang tersedia masih kurang mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan Program LARASITA, terlihat dari sarana Modem GPRS masih belum terkoneksi (belum *on-line*) antara server dengan Mobil dikarenakan koneksi dari Modem GPRS sering mengalami gangguan (putus-putus) dengan aplikasi LARASITA yang ada di server KKP, sehingga terdapat kendala dari jaringan Telkom, sehingga masih dilakukan aplikasi secara *manual*.

Program LARASITA yang dirancang sebagai kantor elektronik BPN yang berbasis satelit dan teknologi informasi ini memerlukan sistem yang teramat canggih, dengan terlebih dahulu harus menjadikan kantor wilayah di tingkat provinsi dan kantor pertanahan di tingkat kabupaten/kota sudah terkoneksi secara *on line* via satelit, baik dengan kantor pusat di Jakarta, maupun antar kantor wilayah di seluruh Indonesia, agar akses Data tidak menjadi tumpang tindih antara pemohon yang datang ke mobil LARASITA, dengan pemohon sertifikasi tanah yang datang langsung ke kantor-kantor BPN. Namun sampai saat ini teknologi informasi yang mampu *memback-up* kebutuhan Program LARASITA dalam implementasinya di lapangan belum tersedia karena biaya untuk itu

sangatlah besar apalagi untuk menasionalkan sistem on line tersebut.

c. Pengaruh Faktor Disposisi (X₃)

Hasil analisis data data menunjukkan bahwa faktor disposisi berpengaruh terhadap efektivitas program LARASITA di Kabupaten Karawang adalah sebesar 0.173 atau 17.3%. Faktor disposisi terdiri dari indikator pemahaman terhadap peraturan/ kebijakan, ketaatan terhadap prosedur dan keahlian/ kemampuan yang cukup dari aparat pelaksana.

Menurut Agustino (2006:159) Disposisi atau sikap diartikan sebagai keinginan dari pelaksana kebijakan untuk menerapkan kebijakan. Manakala implementasi kebijakan ingin berjalan dengan efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan dan keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Hal penting yang harus diperhatikan dalam faktor disposisi antara lain:a). pengangkatan birokrat, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah berdasarkan kompetensi dan dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, b). Insentif, yakni menambah keuntungan atau penghasilan bagi para pelaksana kebijakan.

Hasil survey memberikan gambaran secara umum implementasi kebijakan terkait dengan aspek disposisi berjalan dengan baik. Ini terlihat dari skor total faktor disposisi sebesar 75.9% masuk dalam kategori tinggi. Hasil survey ini mencerminkan bahwa aparaturnya pelaksana implementasi kebijakan sudah memiliki tingkat pemahaman yang baik mengenai peraturan/kebijakan yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, tingginya ketatan pegawai terhadap prosedur kebijakan dan penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan/ keahlian yang dimiliki sangat membantu mensukseskan implementasi kebijakan.

d. Pengaruh Faktor Struktur Birokrasi (X₄)

Hasil analisis data data menunjukkan bahwa Faktor struktur birokrasi berpengaruh terhadap efektivitas program LARASITA di Kabupaten Karawang adalah sebesar 0.317 atau 31.7%. Faktor struktur birokrasi terdiri dari indikator deskripsi pekerjaan/ pembagian kerja, *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Kerjasama/ koordinasi antar unit kerja

Agustino (2006:159) menyatakan bahwa “Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan cara melakukan koordinasi dengan baik. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, akan menyebabkan sumber-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan”.

Widodo (2010:92) menyatakan bahwa “dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dipergunakan sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut”. Tidak jelasnya SOP yang menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab diantara para pelaksana, tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana akan ikut pula menentukan gagalnya pelaksanaan kebijakan.

Secara umum implementasi kebijakan terkait dengan struktur birokrasi dinilai masih kurang baik dengan skor total hanya 66.2 masuk dalam kategori kurang baik khususnya yang terkait dengan deskripsi pekerjaan dan kerjasama antar pihak yang terkait Kebijakan Program LARASITA masih dinilai kurang berjalan

dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa kerjasama dalam konteks pelaksanaan kebijakan diantara seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga mengakibatkan keterlambatan proses penyelesaian pembuatan sertipikat tanah.

Hasil penemuan juga menemukan belum efektifnya kejelasan pembagian kerja dalam pelaksanaan kebijakan Program LARASITA . Secara formal pembagian kerja ini telah memiliki kepastian sehingga memberikan kejelasan bagi aparatur dalam menjalankan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsinya, namun secara operasional belum efektif sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki baik sumberdaya manusia maupun fasilitas yang menunjang.

Pada sisi lain penerapan struktur birokrasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaan dalam implementasi kebijakan tercatat adanya kepatuhan yang tinggi dari aparatur terhadap *Standard Operating Procedur* (SOP) sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III (1980:125)

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah memberikan pengaruh yang kuat terhadap efektivitas program LARASITA di Kabupaten Karawang. Implementasi kebijakan mampu bekerja lebih efektif melalui komunikasi yang efektif, sumberdaya yang berkualitas, sikap dalam melaksanakan pekerjaan juga stuktur birokrasi yang responsif.
2. Secara parsial pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas program LARASITA di Kabupaten Karawang nilainya bervariasi, faktor struktur birokrasi dan sumberdaya dalam implementasi kebijakan merupakan faktor yang memiliki nilai yang paling

merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan.

4.1.2 Pengaruh Variabel Lain (ϵ) terhadap Efektivitas Program LARASITA (Y) di Kabupaten Karawang

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis dapat diperoleh gambaran bahwa secara simultan bentuk pengaruh antar variabel sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan. Implementasi kebijakan yang diukur melalui faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap efektivitas program LARASITA di Kabupaten Karawang sebesar 85.6% dan selebihnya 14.4% dipengaruhi oleh variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

besar, artinya faktor tersebut memberikan pengaruh yang kuat terhadap efektivitas program LARASITA di Kabupaten Karawang sedangkan yang paling rendah nilainya adalah faktor komunikasi dan disposisi, artinya faktor ini kurang berpengaruh terhadap efektivitas program LARASITA di Kabupaten Karawang.

3. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa efektivitas program LARASITA di Kabupaten Karawang tidak hanya dipengaruhi oleh variabel implementasi kebijakan.

5.2 Rekomendasi

Sejalan dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Akademik

Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang fenomena belum optimalnya implementasi kebijakan dan efektivitas program LARASITA di Kabupaten Karawang khususnya ditinjau dari perspektif ilmu pemerintahan. Fenomena tersebut diperkuat oleh adanya variabel lain yang tidak diteliti di luar dari penelitian ini, namun mempengaruhi efektivitas program LARASITA. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan berkaitan dengan efektivitas program LARASITA dipengaruhi oleh implementasi kebijakan.

5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan hasil pembahasan implementasi kebijakan berpengaruh kuat terhadap efektivitas program LARASITA di Kabupaten Karawang, sehingga diperlu dioptimalkan melalui upaya peningkatannya dengan cara:

- a. Komunikasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang mengenai tujuan dan program LARASITA melalui penyampaian informasi kebijakan dapat lebih ditingkatkan intensitas maupun jumlahnya dengan menggunakan berbagai media. Selain

itu perlu adanya perbaikan sarana komunikasi yang menghubungkan mobil LARASITA di lapangan dengan *back office* di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang melalui ketersediaan fasilitas yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi dalam menunjang pelaksanaan kebijakan.

- b. Dalam rangka percepatan pensertipikatan tanah di Kabupaten Karawang, perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) secara sistematis dan proporsional agar terjadi keseimbangan antara beban kerja yang ada dengan kebutuhan di lapangan.
- c. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan/ kebijakan, ketaatan terhadap prosedur dan keahlian/ kemampuan dari aparat pelaksana melalui pelatihan-pelatihan rutin dan terstruktur kepada seluruh aparatur pelaksana kebijakan.
- d. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan program LARASITA perlu adanya koordinasi yang lebih intensif baik dengan pihak internal (antar seksi) maupun pihak lain, agar terbangun sinergi dan komitmen yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Darwin, Muhadjir. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Dialihbahasakan oleh Ricky Istamto. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputinda Gramedia.
- Sudjana, 1996, *Metode Statistika*, Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung :Alfabeta
- Sunggono, B. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta :Sinar Grafika
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : PT. Gunung Agung
- Wahab, Solichin A. 2002. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implemenlasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: BumiAksara.
- Wibawa, Samudra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo

Widodo. 2010. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elek Media Komputindo

Dokumen Dokumen

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.